

## Perencanaan Komunikasi Reklamasi Pemprov Sulsel dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pulau Lae-Lae

Anisa Fahira<sup>\*1</sup>, Moehammad Iqbal Sultan<sup>2</sup>, Muhammad Akbar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

Email: <sup>1</sup>anisafahira1@gmail.com, <sup>2</sup>miqsul@yahoo.com, <sup>3</sup>muh.akbar@unhas.ac.id

### Abstrak

Reklamasi merupakan peralihan wilayah perairan menjadi daratan dengan penimbunan. Reklamasi bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan untuk meningkatkan potensi suatu daerah sehingga diperlukan kerja sama yang baik antara penyelenggara dan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan perencanaan komunikasi yang efektif dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya. Perencanaan komunikasi tidak hanya dibutuhkan untuk memberikan informasi mengenai manfaat dan risiko pembangunan, tetapi juga membangun hubungan yang positif antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan komunikasi reklamasi Pemprov Sulsel dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis perencanaan komunikasi yang diterapkan oleh Pemprov Sulsel pada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Pulau Lae-Lae dalam rencana pembangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, dokumentasi, studi pustaka dan wawancara yang dilakukan bersama informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan komunikasi, Pemprov Sulsel telah menerapkan proses pengumpulan fakta, definisi permasalahan dan pelaksanaan komunikasi.

**Kata kunci:** Perencanaan Komunikasi, Pulau Lae-Lae, Reklamasi

### Abstract

*Reclamation is a deliberate process of altering the submerged area or bodies of water into land suitable for regional development, thus mutual cooperation from the government as developer and local residents is required. In carrying out mutual cooperation, effective communication between both parties is needed. Communication planning is not only needed to provide information about the benefits and risks of development but also to build a positive relationship between the government and the community. This research aims to analyze the communication planning of reclamation implied by the South Sulawesi Provincial Government in cultivating the participation of the community. The focuses of this research are to analyze the communication plan applied by the South Sulawesi Provincial Government to enhance the participation of Lae-Lae Island local residents on the development plan. Data collection techniques include observation, documentation, literature review, and interviews. The interview is conducted with informants that has previously been selected using purposive sampling technique. The results of this research indicate that in communication planning, the South Sulawesi Provincial Government has implemented the process of collecting facts, defining problems, and implementing the communication plan.*

**Keywords:** Communication Planning, Lae-Lae Island, Reclamation.

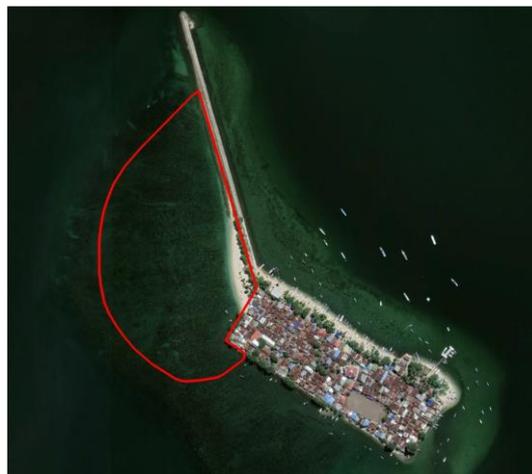
## 1. PENDAHULUAN

Sebuah negara tidak terlepas dari pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dinilai sebagai hal fundamental dalam mengembangkan sebuah wilayah dan menyejahterakan masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Namun, ada kalanya sebuah pembangunan tidak mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Penyebabnya adalah ketidakpastian dan kekhawatiran yang dialami masyarakat tentang kondisi lingkungan maupun sosial dan ekonomi mereka pasca pembangunan.

Reklamasi seringkali diikuti dengan transformasi wilayah menjadi area komersial atau residensial mewah, yang dapat merubah struktur ekonomi lokal. Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada nelayan, pariwisata lokal, atau pekerjaan lain yang terkait dengan kondisi alam pulau, kini menghadapi risiko kehilangan mata pencaharian. Ini tidak hanya mengancam kestabilan ekonomi mereka, tetapi juga identitas dan warisan budaya yang telah terjalin erat dengan lingkungan mereka selama bertahun-tahun. Seperti proyek reklamasi di Pantai Boulevard Manado pada tahun 2019 yang menuai kontroversi, sebab diduga mengakibatkan adanya pertumbuhan kota yang condong ke arah pantai atau laut. Setelah adanya reklamasi ini, hasil laut yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat pesisir Pantai Boulevard berkurang drastis sehingga mereka harus berlayar lebih jauh lagi (Wowor, 2019). Permasalahan ini tentunya akan berakibat negatif pada perekonomian dan secara simultan juga akan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat pesisir Pantai Boulevard.

Di Sulawesi Selatan, Lae-Lae merupakan salah satu kelurahan dari Kecamatan Ujung Pandang yang berbasis kepulauan. Secara regional pulau ini terletak di sebelah barat Kota Makassar dengan waktu tempuh sekitar 5 menit dari dermaga Kayu Bangkoa. Pulau seluas 6.5 hektar ini merupakan pulau berpenghuni dengan penduduk sebanyak 1.865 jiwa yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada perairan Pulau Lae-Lae. Mayoritas masyarakat di sana bekerja sebagai nelayan dan pengelola lokasi wisata, sehingga pelaksanaan reklamasi di sebelah barat Pulau Lae-Lae tentunya akan membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat apabila rencana pemerintah tidak melibatkan aspirasi dari warga setempat. Di sisi lain, akan sangat disayangkan apabila wilayah dengan potensi besar dalam bidang pariwisata dan konservasi terumbu karang tidak dikelola dengan baik.

Maka dari itu, Pemprov Sulawesi Selatan berencana mereklamasi wilayah di sebelah timur Pulau Lae-Lae untuk dijadikan tujuan wisata baru yang akan melibatkan warga Lae-Lae dalam pembangunan dan pengelolannya. Dilansir dari laman resmi Pemprov Sulsel (2023), reklamasi dilaksanakan di bagian timur Pulau Lae-Lae. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa area seluas 12.11 hektar tersebut merupakan lahan tidak berpenghuni, sehingga risiko pengusuran tempat tinggal warga dapat diminimalkan. Lahan tersebut merupakan pengganti kekurangan lahan reklamasi Center Point of Indonesia (CPI) yang dijanjikan oleh PT. Yasmin Bumi Asri kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.



Sumber: Arsip Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang  
Gambar 1. Site Plan Lae-Lae

Sebagai rencana pembangunan berkelanjutan, reklamasi di Pulau Lae-Lae tentunya memiliki tujuan jangka panjang positif bagi masyarakat. Hanya saja, dalam proses pelaksanaan reklamasi terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi. Hal tersebut berkaitan dengan kurangnya keharmonisan di antara pemerintah dan masyarakat yang berimbas pada kurang efektifnya komunikasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Padahal, sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam setiap rencana

partisipasi dan mengintegrasikan perspektif mereka ke dalam perencanaan dan pembangunan untuk mendapatkan pengetahuan lokal mengenai wilayah yang akan dibangun (Scott, 1998). Selain itu, pemerintah juga dianggap kurang akuntabel dalam menindaklanjuti kekhawatiran masyarakat pada rencana pembangunan sebelumnya, sehingga berkurangnya citra positif pemerintah di mata masyarakat. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat. Apabila tidak ditanggapi dengan serius, situasi ini dapat dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggungjawab sebagai celah untuk menyampaikan informasi yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan.

Dengan berdasar pada fenomena tersebut, penulis berpendapat bahwa keberhasilan pengembangan ini bergantung pada proses komunikasi yang baik. Menyinggung tentang komunikasi dalam organisasi, lanskap pembangunan berkelanjutan yang kompleks tentunya membutuhkan manajemen komunikasi untuk dapat menyampaikan informasi secara jelas dan tepat waktu kepada masyarakat tentang kebijakan, program dan inisiatif yang dilaksanakan oleh pemerintah (Bobbio, 2019:89). Diperlukan pendekatan komunikasi yang tepat serta komitmen pemerintah untuk bersikap transparan dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat meningkat. Dalam konteks penelitian ini, pemerintah perlu memformulasikan perencanaan komunikasi yang efektif terutama dengan warga lokal Pulau Lae-Lae sebagai *secondary stakeholder* yang tentunya memiliki wewenang pada pengambilan keputusan di lingkungan mereka.

Perencanaan komunikasi adalah elemen penting dalam membantu organisasi membangun hubungan yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, memfasilitasi aliran informasi yang tepat waktu dan akurat, serta mengelola isu-isu yang mungkin timbul dengan cara yang transparan dan responsif. Dalam skema yang lebih luas, perencanaan komunikasi juga berfungsi sebagai entitas yang membentuk dan menjaga nama baik organisasi di mata publik (Hasibuan 2007). Dengan demikian, perencanaan komunikasi merupakan salah satu elemen pendukung yang dapat menyokong sebuah organisasi untuk mencapai visi dan misinya.

Fenomena minimnya partisipasi masyarakat dalam rencana reklamasi di Pulau Lae-Lae merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Mengingat sebuah negara akan terus melakukan pembangunan yang berkesinambungan demi tujuan-tujuan bersama yang ingin dicapai. Hal ini tentu saja akan selalu melibatkan masyarakat dalam prosesnya, sehingga dibutuhkan kajian mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan seperti reklamasi di Pulau Lae-Lae. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan meliputi tingkat pemahaman masyarakat tentang rencana reklamasi, kepentingan dan dampaknya terhadap lingkungan serta mata pencaharian lokal, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan proyek-proyek pembangunan, serta upaya untuk memperkuat kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam menyuarakan pendapat dan kepentingannya.

Penelitian ini mengaplikasikan Teori *Critical Public Relations*, yang fokus utamanya adalah dominasi satu kelompok terhadap kelompok lain. Teori ini mendukung pentingnya penerapan prinsip-prinsip *public relations* dalam sebuah instansi untuk mendukung dan memperjuangkan kepentingan publik yang terpinggirkan serta meningkatkan kemampuan dan pengaruh yang dimiliki oleh publik untuk dapat berpartisipasi. Teori ini memiliki sejumlah asumsi yang menjadi dasar terbentuknya pendekatan *Public Relations* Kritis, di antaranya adalah:

- a. Adanya dominasi kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi, sehingga kelompok lain dianggap tidak memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat di dalam organisasi tersebut.
- b. Kurangnya wadah yang memfasilitasi partisipasi publik dalam kegiatan organisasi.
- c. Kurangnya aspek etika dan tanggungjawab sosial sebuah organisasi dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Mengintegrasikan kepentingan publik internal dan eksternal merupakan kunci dari kerjasama yang harmonis. Teori *Public Relations* Kritis menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan yang efektif dalam komunikasi organisasi, penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan secara aktif dan transparan. Perencanaan komunikasi yang sistematis memainkan peran penting dalam proses ini

dengan memastikan bahwa setiap pesan yang disampaikan tidak hanya menginformasikan tetapi juga menginspirasi partisipasi dan umpan balik dari penerima informasi.

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perencanaan komunikasi reklamasi yang diterapkan oleh pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Pulau Lae-Lae.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menyajikan data deskriptif dalam bentuk lisan maupun tulisan dari orang atau fenomena yang diamati (Moleong, 2016). Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Lae-Lae. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui:

- a. Observasi, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman tentang kondisi aktual di Pulau Lae-Lae, termasuk dinamika interaksi antara masyarakat lokal, pihak terkait proyek reklamasi, dan lingkungan sekitar
- b. Wawancara semi terstruktur untuk mendapatkan data dari informan yang terlibat langsung dalam rencana reklamasi Pulau Lae-Lae.
- c. Dokumentasi untuk tambahan data, memperkuat data yang sudah ada atau untuk memproyeksikan data. Dokumentasi dalam penelitian ini mencakup dokumen tentang perencanaan reklamasi berupa gambar dan video, publikasi, dan lain-lain.

Data tersebut dianalisis menggunakan analisis data kualitatif yang melibatkan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun teknik pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling* berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan sebelumnya; pihak pemerintah dan masyarakat lokal Lae-Lae yang terlibat dalam perencanaan komunikasi reklamasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan komunikasi yang diimplementasikan oleh Pemprov Sulsel dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Pulau Lae-Lae. Dengan melakukan analisis kondisi dari suatu wilayah yang akan dibangun maka akan didapatkan perencanaan komunikasi yang efektif. Dalam hal ini, peneliti mengidentifikasi apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat masyarakat dalam berkomunikasi. Kemudian, peneliti akan memaparkan perencanaan komunikasi yang diimplementasikan oleh pemerintah dan menganalisa bagaimana efektivitas komunikasi tersebut dapat ditingkatkan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan adalah langkah awal yang penting dalam aktivitas manajemen di setiap organisasi. Sejalan dengan pandangan tersebut, Qoimah (2018:201) perencanaan memegang peranan penting dalam praktik komunikasi, yang meliputi berbagai aspek seperti pertimbangan alternatif, evaluasi manfaat dan risiko dari setiap alternatif, pengambilan keputusan mengenai langkah-langkah yang akan diambil, penetapan anggaran, serta memperoleh persetujuan dan dukungan yang diperlukan dari manajemen lembaga yang bersangkutan. apabila sebuah organisasi memiliki perencanaan yang terstruktur dengan baik, maka pelaksanaan kegiatan pun akan berjalan lancar. Sebaliknya, kurangnya perencanaan akan mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan di masa depan.

Reklamasi Pulau Lae-Lae dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan wilayah terbengkalai untuk:

- a. Pengembangan sektor pariwisata dengan membangun fasilitas-fasilitas modern seperti resort, restoran, dan area rekreasi yang dapat menarik lebih banyak wisatawan domestik dan mancanegara. Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik Pulau Lae-Lae sebagai destinasi wisata unggulan di Kota Makassar.
- b. Meningkatkan infrastruktur pendukung seperti jalan, dan lanskap wilayah yang menambah nilai estetika dan kemudahan akses bagi wisatawan. Dengan infrastruktur yang lebih baik, pengalaman wisatawan akan lebih nyaman dan menyenangkan, mendorong kunjungan berulang dan peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata.

- c. Melakukan revitalisasi lingkungan untuk menjaga kelestarian terumbu karang dan ekosistem laut lainnya. Ini termasuk proyek konservasi yang bekerja sama dengan organisasi lingkungan dan komunitas lokal untuk memastikan bahwa reklamasi tidak merusak keanekaragaman hayati yang menjadi daya tarik utama Pulau Lae-Lae.
- d. Mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal dalam berbagai kegiatan ekonomi dan pariwisata. Dengan memberikan pelatihan dan peluang usaha, masyarakat setempat dapat merasakan manfaat langsung dari peningkatan sektor pariwisata, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan mereka.

Namun, sebelum melakukan perencanaan, terdapat aspek-aspek lokal yang terlebih dahulu harus dipahami sebagai berikut:

Tabel 1. Kondisi Lokal Pulau Lae-Lae

No.	Aspek	Justifikan
1.	Kondisi Fisik	Pulau Lae-Lae memiliki luas keseluruhan sebesar 9.5 hektar dengan total area yang dihuni oleh penduduk lokal adalah seluas 6.5 hektar. Area yang tidak berpenghuni merupakan salah satu lokasi nelayan tradisional menjaring ikan.
2.	Kondisi Sosial	Pulau Lae-Lae memiliki 1.865 penduduk. Kebanyakan dari mereka berasal dari daerah lain dan telah bermukim selama puluhan tahun dan hidup secara turun temurun di pulau ini. Kondisi sosial tersebut menciptakan dinamika kepemilikan lahan yang kompleks sehingga perlu upaya serius untuk menyelesaikannya.
3.	Kondisi Ekonomi	Tinggal di tengah-tengah perairan membuat mayoritas masyarakat Pulau Lae-Lae menggantungkan hidup pada sumber daya laut dan pariwisata. Sebagian besar berprofesi sebagai nelayan tradisional dan nelayan transportasi. Beberapa masyarakat juga berprofesi sebagai pengelola lokasi wisata dan pedagang yang menjajakan kerajinan tangan dari bahan-bahan yang berasal dari laut seperti kulit kerang. Beberapa dari mereka juga mengelola rumah makan <i>seafood</i> yang menjadi salah satu daya tarik wisata Pulau ini.
4.	Kondisi Lingkungan	Pulau Lae-Lae merupakan kepulauan yang paling dekat dengan daratan Kota Makassar. Pulau ini berbatasan langsung dengan perairan Makassar dari segala sisi. Pulau ini memiliki habitat terumbu karang yang sangat besar, perairannya pun dihuni oleh biota laut yang beragam.

Meskipun merupakan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) seperti yang tertera dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan no. 3 Tahun 2022, pulau ini mempunyai masyarakat yang menggantungkan hidup pada kondisi perairan sekitar Pulau Lae-Lae. Mereka hidup berdampingan dengan laut, sehingga reklamasi yang tidak sistematis dan tidak melibatkan masyarakat tentunya akan menimbulkan kekacauan pada tatanan masyarakat. Dampak yang signifikan tersebut tidak hanya berpengaruh pada lingkungan hidup mereka, tetapi juga tatanan sosial dan ekonomi masyarakat Pulau Lae-Lae. Hal tersebut tentunya harus menjadi pertimbangan besar bagi pemerintah untuk merancang rencana reklamasi yang tepat sasaran. Hal tersebut memerlukan partisipasi dari masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa rencana pengembangan tersebut tidak hanya memberikan manfaat ekonomi semata, tetapi juga memperhitungkan aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, perencanaan komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam menggalang dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga pengembangan Pulau Lae-Lae dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan serta keberlanjutan seluruh pihak yang terlibat.

### 3.1. Perencanaan Komunikasi Reklamasi Pemprov Sulsel

Perencanaan komunikasi reklamasi yang efektif sendiri memerlukan langkah strategis yang berfokus pada pengumpulan fakta dan definisi permasalahan. Sebelum melaksanakan pembangunan, penting untuk mengidentifikasi konteks lokal yang ada di wilayah pembangunan (Scott, 1998). Pelaksana wajib mengetahui kondisi sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat di mana pembangunan akan dilaksanakan, termasuk juga permasalahan yang ada di dalamnya.

Dengan kekhawatiran yang telah diidentifikasi, pemerintah menciptakan perencanaan komunikasi yang berpedoman pada permasalahan-permasalahan tersebut. Rencana komunikasi yang dirancang oleh pemerintah ini berfokus pada interaksi dengan masyarakat lokal. Membuat rencana komunikasi yang efektif untuk berbicara dengan masyarakat sangat penting untuk pelaksanaan program (Fajri, et. al, 2018). Pertama-tama, komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat terinformasi dengan baik tentang detail proyek. Penyajian rencana yang jelas dan transparan, termasuk tujuan, manfaat, dan potensi tantangan, membantu membangun pemahaman dan mengatasi segala kekhawatiran. Dengan mendorong lingkungan yang terbuka dan mudah diakses, perencanaan perencanaan komunikasi menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka, bertanya, dan berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Pada tahapan ini, pemerintah telah secara aktif melakukan perencanaan komunikasi. Peneliti menganalisis perencanaan tersebut dengan mengaplikasikan Teori *Public Relations* Kritis sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Perencanaan Komunikasi Reklamasi Pemprov Sulsel

No.	Asumsi Teori	Idealnya	Bentuk Perencanaan Komunikasi yang Dilakukan Pemprov Sulsel
1.	Adanya dominasi kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi.	Tidak ada publik dominan. Seluruh kelompok memiliki akses yang sama ke dalam organisasi dan pengambilan Keputusan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan sosialisasi pembangunan dengan masyarakat oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya &amp; Tata ruang.</li> <li>- Menyebarkan pamflet berisi informasi tentang perencanaan, manfaat dan risiko dari reklamasi kepada masyarakat.</li> <li>- Membangun kemitraan dengan LSM dan komunitas untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.</li> <li>- Mengadakan forum diskusi dan konsultasi publik yang memungkinkan masyarakat berkomunikasi secara dua arah untuk pemerintah.</li> </ul>
2.	Kurangnya wadah yang memfasilitasi partisipasi publik dalam kegiatan organisasi.	Publik internal dan eksternal mendapat fasilitas yang setara dalam berkomunikasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melibatkan pihak ketiga seperti DPRD Sulawesi Selatan untuk memfasilitasi diskusi dengan perwakilan masyarakat Pulau Lae-Lae.</li> <li>- Melibatkan media lokal dalam menyampaikan informasi dan mendengarkan aspirasi masyarakat.</li> </ul>
3.	Kurangnya aspek etika dan tanggungjawab sosial sebuah organisasi dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.	Memastikan bahwa perencanaan yang dilakukan memberi keuntungan yang sama bagi publik internal dan publik eksternal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan identifikasi isu-isu sosial dan lingkungan sebelum melakukan perencanaan reklamasi.</li> <li>- Merumuskan pesan yang menekankan pentingnya kesejahteraan bersama, transparansi dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan.</li> <li>- Mengumpulkan umpan balik secara berkala melalui diskusi kelompok terfokus.</li> <li>- Merumuskan rencana keterlibatan masyarakat sejak pra hingga pasca perencanaan.</li> </ul>

Dapat dilihat pada Tabel 2 di atas mengenai perencanaan komunikasi bahwa pemerintah telah mengaplikasikan prinsip-prinsip public relations, di mana mereka berfokus pada transparansi,

keterlibatan masyarakat, dan penyebaran informasi yang efektif. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam berbagai strategi komunikasi yang digunakan, seperti konsultasi publik, penyebaran pamflet informatif, dan penggunaan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

Selain itu, pemerintah juga telah berupaya membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan melalui forum diskusi dan pelatihan komunitas, yang menunjukkan komitmen mereka terhadap keterlibatan aktif dan kolaborasi dengan masyarakat lokal. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam mengurangi resistensi terhadap proyek pembangunan, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki dan dukungan dari masyarakat terhadap inisiatif yang dilakukan. Melalui perencanaan komunikasi yang matang dan beretika, pemerintah berhasil menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan di Pulau Lae-Lae.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Pulau Lae-Lae, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu memperbaiki perencanaan komunikasi mereka dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis teknologi. Pertama, membentuk tim komunikasi lokal yang terdiri dari perwakilan masyarakat setempat dapat menjadi langkah awal yang efektif. Selain itu, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan pemimpin adat dalam proses komunikasi dapat meningkatkan kepercayaan dan rasa memiliki di kalangan penduduk. Dengan demikian, informasi mengenai proyek pembangunan dapat tersampaikan dengan lebih jelas, dan masyarakat akan merasa lebih didengar serta dihargai.

Kedua, pemanfaatan teknologi digital dapat signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah bisa mengembangkan aplikasi atau platform digital yang memungkinkan masyarakat Pulau Lae-Lae untuk mendapatkan informasi terkini tentang proyek-proyek yang sedang berlangsung, memberikan umpan balik, dan berpartisipasi dalam diskusi online. Meenggunakan media sosial secara strategis juga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi dan mengadakan sesi tanya jawab langsung bisa membuat komunikasi lebih interaktif dan responsif. Untuk menambah akuntabilitas, pemerintah secara rutin dapat menerbitkan laporan transparan yang menunjukkan kemajuan proyek dan tanggapan terhadap masukan masyarakat. Dengan pendekatan yang berbasis teknologi dan akuntabilitas ini, diharapkan partisipasi masyarakat dapat meningkat secara signifikan, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

#### **4. KESIMPULAN**

Perencanaan komunikasi merupakan hal krusial dalam setiap rencana pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama dalam mengintegrasikan pendapat mereka ke dalam rencana pembangunan. Dalam rencana reklamasi Pulau Lae-Lae, Pemprov Sulsel telah menerapkan perencanaan komunikasi yang berpedoman pada identifikasi masalah dan kekhawatiran masyarakat setempat. Langkah-langkah komunikasi yang terstruktur ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat jelas, transparan, dan dapat dipahami dengan baik. Namun ada baiknya apabila perencanaan komunikasi ini diikuti dengan sikap akuntabel Pemprov Sulsel pada pelaksanaan dan pasca pembangunan. Dengan demikian, manfaat dari reklamasi Pulau Lae-Lae dapat didistribusikan secara merata dan dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lama oleh masyarakat Pulau Lae-Lae.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bobbio, L. 2019. *Designing effective public participation*. *Policy and Society*, 38(1), 31-57.
- Christovel, W., Salmin, D., & Very, L. (2019). Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai Boulevard pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Sario Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(77).
- Diradimalata, K., Joorie, M. H., Welson, R. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(80), 14-24.
- Fajri, C., Mawadati, S., & Yudhana, A. (2018). Komunikasi Sosial Pemerintah Kulon Progo Dalam Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Terkait Pembangunan New Yogyakarta Internasional Airport. *Jurnal Komunikator*, 10(2), 140-151.
- Hafied, C. (2018). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. PT. Raja Grafindo Persada Makassar.

- Malayu, S. P. H. (2007). *Manajemen Sumber Daya Cetakan Kesepuluh*. Bumi Aksara Jakarta.
- Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Media Kita, 2005.
- Pemprov. S. (2023). Pemprov Sulsel Jamin Tak Ada Penggusuran Selama Reklamasi di Sekitar Pulau Lae-Lae Makassar. <https://ppid.sulselprov.go.id/berita/pemprov-sulsel-jamin-tak-ada-penggusuran-749>, diakses 21 Maret 2024
- Qoimah. (2018). Membangun Pelayanan Publik yang Prima: Strategi Manajemen Humas Dalam Penyampaian Program Unggulan di Lembaga Pendidikan. *Islamic Management. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(02), 191–206. <https://doi.org/10.30868/im.v1i2.269>
- Rachmat, K. (2014). *Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal: Aplikasi Penelitian dan Praktik*. Kencana Jakarta.
- Scott, M. C., Allen H. C., & Glenn, M. B. (1985). *Effective Public Relations*. Prentice-Hall Wisconsin.
- Siti, I. A. D. (2015). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Solekhan. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. SETARA Press Malang.
- William, R. S. (1998). *Organizations rational, natural, and open systems* (4th ed). Prentice-Hall Inc New Jersey.